

Peningkatan Kapasitas Kades dan Perdes

MAGELANG (KR) - Bupati Magelang Zaenal Arifin, menekankan sinergitas dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa, menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan di desa, tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka pembangunan tidak bisa mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Hal tersebut disampaikan pada acara pembukaan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa (Perdes) se-Kecamatan Ngluwar yang dihadiri Forkompimda, OPD terkait dan Forko-pimcam Kecamatan Ngluwar di GOR Desa Jamus-kauman Kecamatan Ngluwar, Rabu (14/12).

“Oleh karena itu, untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan adanya pemimpin yang dapat mendorong dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan desa,” kata Zaenal. Zaenal mengatakan, Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa merupakan administrator pemerintah, administrator masyarakat, dan administrator dalam pembangunan, dimana dalam hal pembangunan ini, Kepala Desa memiliki peranan penting dalam menumbuhkan, meningkatkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa.

“Kepala Desa dapat berperan nyata dalam proses kegiatan pembangunan di desa, dengan cara memberikan arahan, binaan ataupun penyuluhan kepada masyarakat desa tentang arti pentingnya pembangunan desa bagi kelangsungan hidup masyarakat,” ujarnya. Ia juga berpesan agar setiap sumber dan penggunaan dana di Desa bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada, demi terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari.

(Bag)-f

Zainal Choirul Ketua DPD LVRI Jateng

SEMARANG (KR) - Sekjen LVRI Pusat Laksamana Madya TNI Purn Djoko Sumaryono, Rabu (14/12) atas nama Ketum LVRI Letjen Purn Mantiri melantik Kol (Purn) Zainal Choirul SH sebagai Ketua DPD (Mada) LVRI Jateng dalam Musda LVRI Jateng yang digelar di Gedung Juang 45 Semarang. Zainal Choirul merupakan calon tunggal yang terpilih secara aklamasi dan disetujui forum Musda yang dihadiri seluruh Kamacab LVRI se-Jateng. Zainal Choirul akan menjabat hingga 2027. Kepemimpinannya di Markas Daerah LVRI Jateng menggantikan Kol Purn H Amin Munadjad SIP yang sudah 1 tahun berhalangan karena sakit dan dirawat di Jakarta.

Sekjen DPP LVRI Laksdya TNI Pur Djoko Sumaryono dalam sambutan mengapresiasi Ketua lama dengan ucapan terima kasih dan berharap segera sembuh. Sedang kepada Ketua Baru, berharap dalam waktu selama-lamanya 2 bulan dari terpilih segera menyusun kepengurusan daerah agar bisa segera mendapat penge-sahan dari DPP LVRI Pusat. Djoko juga berpesan agar Mada dan Macab LVRI sering berkomunikasi, termasuk dengan pimpinan pusat agar bila ada kendala di lapang-an terkait administrasi dan lainnya bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat. Termasuk pengurusan tanda kehormatan veteran atau skep veteran. “Segera koordinasikan kepada kami, agar hak yang mestinya didapat segera diberikan,” tandas Djoko Sumaryono. Terpisah, Kamada Pemuda Panca Marga Jateng Hj Gatyt Sari Chotidjah SH MM menyatakan bahagia dan mengucap-lan selamat atas dilantiknnya Ketua Mada LVRI Jateng Kol Purn Zainal Choirul SH.

(Cha)-f



KR-Chandra AN

Sekjen DPP LVRI (kanan) serahkan pataka LVRI kepada Kol Purn Zainal Choirul sebagai Ketua DPD LVRI Jateng terpilih.

Unimus-Kanwil Kemenkum HAM Jateng Teken MoA

SEMARANG (KR) - Menyusul penandatanganan MoU September 2022 lalu, Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) melakukan penandatanganan kerja sama aksi atau Memorandum of Action (MoA) dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng di kampus Unimus, Rabu (14/12). Penandatanganan dilakukan Kepala LP2M Unimus Prof Dr Purnomo MENG dan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng Dr A Yuspahruddin BcIP SH MH dengan disaksikan Rektor Unimus Prof Dr Masruki MPd sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah Se-Jateng.

Pada tempat dan waktu yang sama Ka Kanwil juga menandatangani MOA dengan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta/Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Perguruan Tinggi Aisyiyah Se Jateng. Usai penandatanganan dilanjutkan Sosialisasi KUHP yang baru dan hak Kakayaan Intelektual (HAKI). “Kami dan jajaran siap bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, khususnya wilayah Jateng. Di Jateng kami punya 7 unit pelaksana teknis (UPT) di beberapa kabupaten/kota di Jateng yang siap mendukung kerjasama ini. Semuanya demi memajukan negeri dan untuk bangsa ini” ujar Dr A Yuspahruddin BcIP SH MH.

(Sgi)-f



KR-Sugeng Irianto

Ka Kanwil Kemenkum HAM Jateng (kiri) bersama pimpinan Unimus menunjukkan naskah kerja sama.

DPD RI Usul Kontribusi Aktivis Perempuan Dioptimalkan

SEMARANG (KR) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Jateng Dr Abdul Kholik mengapresiasi peran dan kontribusi perempuan dalam memajukan pembangunan di semua sektor. Aktivis dan organisasi perempuan, lanjut Abdul Kholik, ikut berkontribusi yang sangat luar biasa di bidang kesehatan, pendidikan, stunting dan lainnya.

“Harusnya pemerintah berterima kasih kepada para aktivis perempuan. Kami dari DPD RI sangat mengapresiasi. Sebenarnya jika dikolaborasi untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah pusat dan daerah, akan jauh lebih berkembang kontribusi dan peranan para perempuan,” tegas anggota DPD RI Perwakilan Jateng, Abdul Kholik pada Rembug Perempuan, di kantor DPD RI Provinsi Jateng, Rabu (14/12).

Hadir menjadi pembicara anggota DPD RI Abdul Kholik, Ketua TP PKK Provinsi Jateng Hj Siti Atikoh

Ganjar Pranowo yang diwakili oleh Kepala Dinas (DP3AP2KB) Jawa Tengah Retno Sudewi, Ketua PW Muslimat NU Jawa Tengah Prof Dr Hj Ismawati dan Ketua PW Aisyiyah Jateng Dr Hj Ummul Baroroh dan sebagai moderator Hj Munawaroh.

Puluhan perempuan yang mengikuti diskusi itu antara lain berasal KKBN Jateng, BKOW Jateng, KP-RK MUI Jateng, IBI Jateng, Dharma Wanita Persatuan Jawa Tengah, Perempuan LDII Jawa Tengah, Wanita AI Irsyad Jawa Tengah, Majelis Taklim Mariatus Sholihah, IWAPI Jateng, WKRI Jateng, Jaringan Jurnalis Perempuan (JPP) Jateng, Kopri PKC PMII Jateng dan PW Nasyiatul Aisyiyah Jateng. Abdul Kholik mengatakan bila melihat Jateng dari Kota Semarang memang tampak baik-baik saja. Namun, apabila dilihat tiap kabupaten/kota pihaknya menilai masih banyak pembenahan yang harus dilakukan.

“Kalau dilihat dari Semarang seolah sudah baik. Tapi secara keseluruhan 35 kabupaten/kota perlu pembenahan lagi untuk hasil pembangunan,” kata Abdul Kholik. Anggota Senator asal Cilacap ini menambahkan, permasalahan-permasalahan tersebut mulai dari pengentasan kemiskinan, kekerasan kepada perempuan, kesetaraan gender hingga stunting. Pasalnya, masih banyak potensi di Jateng yang belum tergali dan dimaksimalkan secara

masif.

“Ini yang membuat keseimbangan belum ada dan problem pembangunan Jateng belum teratasi. Memang, industri berkembang di Jateng, tapi kebanyakan padat karya, seperti garmen dan sebagainya, tapi menjadikan sisi kemandirian industrinya belum kuat. Karena bahan baku impor semua, kita kebagian ongkos produksinya,” terangnya.

(Isi)-f



KR-Isdiyanto

Anggota DPD RI Dr Abdul Kholik bersama para aktivis dan organisasi perempuan.

Warga Jateng Diimbau Jaga Kondusivitas

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyoroti empat hal menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023. Antara lain pasokan pangan, pengaturan lalu lintas, tempat pariwisata dan kondusivitas wilayah.

Hal itu disampaikan Ganjar kepada wartawan di Semarang Kamis (15/12). Ganjar mengatakan mulai minggu ini Pemprov Jateng bersama instansi terkait mulai mempersiapkan dan pematangan dalam menghadapi libur Nataru.

“Kita memantau pangan, pasokannya dan distribusinya, karena

beberapa harga kebutuhan pokok masyarakat mulai merangkak naik. Berdasarkan pantauan tim pangan Jawa Tengah, harga-harga tersebut naik dikarenakan beberapa komoditas tersebut belum panen,” tutur Ganjar Pranowo.

Jateng juga harus menyiapkan

Jateng Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berhasil membawa Jateng sebagai pemerintah provinsi terbaik dalam keterbukaan informasi publik. Anugerah dari Komisi Informasi Pusat itu langsung diterima Ganjar Pranowo di Banten, Rabu (14/12). Jateng mendapat peringkat pertama provinsi keterbukaan informasi publik dengan nilai 99,95. Disusul Provinsi Jabar dengan nilai 98,85 dan Provinsi Aceh dengan nilai 98,64.

Ganjar Pranowo kepada wartawan di Semarang, Kamis (15/12) mengatakan anugerah tersebut menjadi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kelima yang diraih Jateng di bawah kepemimpinannya.

Penganugerahan di tahun 2022 ini, diserahkan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD.

Pada penganugerahan tersebut, Ganjar membeberkan rahasianya mendapatkan nilai nyaris sempurna itu. Menurutnya karena komitmen memperbaiki diri dan memperhatikan informasi di luar indikator Komisi Informasi.

Hal itu pun sesuai dengan yang

disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam sambutannya. Mahfud mengatakan, media sosial menjadi modal badan publik memulai mengelola keterbukaan informasi dengan baik.

“Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, maka orang boleh nutupin kaya apapun, tapi kalau video sudah ditempel ke objeknya maka semua akan jadi terbuka. Maka terbuka saja, tidak usah risih kalau kita bersih,” tutur Ganjar.

Mantan anggota DPR RI itu menuturkan, capaian Pemprov Jateng ini tidak bisa terjadi tanpa kerja keras para ASN-nya. Ganjar mengatakan, penganugerahan ini adalah pertunjukkan dari komitmen tersebut. “Alhamdulillah hari ini mencapai puncaknya. Lima kali berturut-turut, menurut saya ini pertunjukkan komitmen dari kawan-kawan di Pemprov Jawa Tengah untuk membuka informasi seluas-luasnya,” tandasnya.

Sejak 2018, Ganjar membawa Jateng menjadi juara pertama dan provinsi terbaik nasional keterbukaan informasi publik. Kemudian tahun 2019 Jateng kembali mendapat predikat sebagai provin-

si paling informatif. Tradisi baik sebagai provinsi informatif itu di-

lanjutkan pada tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.

(Bdi)-f



KR-Budiono

Ganjar Pranowo (kiri) menerima penghargaan dari Menkopolkukam Mahfud MD.

Pemasaran Home Stay Lewat Satu Pintu

MAGELANG (KR) - Badan Otorita Borobudur (BOB) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang, Kempenarekraf, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memfasilitasi kesepakatan kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Asosiasi Homestay di Kawasan Borobudur Magelang. Penandatanganan kesepakatan kerja sama dilakukan di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Borobudur, Rabu (14/12).

“Ketiga desa itu masing-masing melakukan kerja sama dengan BUMDes desa. Kami memfasilitasi MoU-nya,” kata Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata Badan Otorita Borobudur Bisma Jatmika. Ketiga desa yang difasilitasi melakukan kerja sama tersebut adalah Desa Tuksongo, Desa Karanganyar dan Desa Karangrejo. Kerja sama fokus pada pengelolaan homestay satu pintu agar penjualan dapat adil dan merata.

Dengan begitu, penjualan tidak hanya fokus pada home stay tertentu, namun bisa merata dan dinikmati semua pihak. Durasi kerja sama selama tiga tahun hingga 2025 mendatang. Namun dapat diperbarui atas kesepa-

katan bersama. “Pengelolaan home stay satu pintu. Kita berikan fasilitasi agar home stay dapat berjalan dengan baik sesuai keinginan bersama, bisa maju dan lebih baik. Dengan begitu diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat,” jelasnya.

Ruang lingkup pengelolaan home stay meliputi beberapa poin, diantaranya berkaitan dengan promosi dan penjualan, pengembangan paket wisata berbasis kearifan lokal, dan pelatihan peningkatan produk.

Selain itu juga fokus pada bagaimana pelayanan dan pengelolaan home stay, serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk membuat usaha homestay mandiri.

Pada kesempatan yang sama, BOB juga melakukan MoU dengan Euro Asia Management dari Singapura. Fokus kerja sama pada pengembangan Industri Pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur.

Plt Direktur Utama Badan Otorita Borobudur Agustin Peranginangin mengatakan Euroasia merupakan perusahaan internasional yang sudah memiliki pengalaman mumpuni di bidang pariwisata, baik selaku proyek development, konsultan, investor dan pengelola pariwisata.

Selain itu kerjasama juga fokus pada pembuatan dan penyempurnaan pembangunan Kawasan Borobudur Highland, dan pengembangan kawasan lain yang masih termasuk dalam kewenangan BOB. Diharapkan adanya kerja sama menjadikan kawasan otoritatif yang akan dibangun berjalan lancar dan sesuai target. “Kami juga akan melakukan penjajakan, diskusi, pertukaran data, informasi dan asistensi yang penting,” imbuhnya.

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Rustam Efendi diantaranya mengatakan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah wajib hukumnya agar pengelolaan pariwisata berjalan harmonis. Salah satunya yang di-

lakukan dengan fasilitasi kerjasama pengelola hunian wisata ini dengan BUMDes.

“MoU ini jadi awalan dan proyek percontohan bagi pengelolaan hunian wisata di desa lainnya, utamanya di 5 destinasi super prioritas. Ini tantangan, karena sebagai rujukan, maka tunjukkan bahwa kerja sama ini memberi manfaat besar bagi masyarakat setempat,” katanya.

Sebenarnya pengelolaan homestay satu pintu ini sudah digagas sejak lama oleh lembaga dan instansi terkait. Sejauh ini ada 362 karhutla yang dibangun Kementerian PUPR, tetapi hingga saat ini tidak bisa dikelola dengan baik karena berbagai alasan, seperti sarana dan prasarana dan SDM.

(Tha)-f



KR-Thoha

Naskah kerja sama yang sudah ditandatangani ditunjukkan secara bersama.